



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



ꦒꦤꦸꦁꦱꦠꦏꦼꦂꦠꦶꦭꦏꦺꦧꦶ
Nangun Sat Kerthi Loka Bali
melalui pola pembangunan Semesta Berencana
menuju **BALI ERA BARU**

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BALI TAHUN 2022





GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA
PROVINSI BALI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2022.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan Tahunan Daerah Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Semesta Berencana.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 yang dimulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 3

Susunan dan sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi fisik dan keuangan secara berkala atas pelaksanaan DPA-SKPD.
- (2) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
 - b. Inspektorat Daerah Provinsi;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; dan
 - d. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi.
- (3) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 18 Oktober 2021

GUBERNUR BALI,



WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 47



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	7
1.3 Hubungan Antar Dokumen	9
1.4 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penyusunan Renja Disdikpora Provinsi Bali	12
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISDIKPORA PROVINSI BALI TAHUN 2021	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	14
2.2 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdikpora Provinsi Bali	40
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	57
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	57
3.3 Program dan Kegiatan	58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDIKPORA PROVINSI BALI	64
BAB V PENUTUP	65
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISDIKPORA PROVINSI BALI TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
2. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Bali merupakan tugas pokok Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik maka diperlukan perencanaan yang matang setiap tahunnya dan mengacu pada Renstra yang ada. Pembenahan terhadap Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan pada tingkat fleksibilitas maupun instabilitas terhadap lingkungan strategik, baik secara internal maupun eksternal.

Peran anggaran pemerintah sebenarnya hanya stimulan investasi disamping itu anggaran juga merupakan instrumen pengendalian, memberikan informasi rinci atas pelaksanaan operasional program maupun kegiatan. Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia (SDM), peran sub sektor Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga memiliki kaitan kuat di hulu, on farm maupun hilir, namun peran strategis belum banyak dipahami dan belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta serta dihadapkan pada berbagai kendala. Penerapan anggaran terpadu (Unified Budget) dan berbasis kinerja (Performance Budget) masih banyak mengalami kendala, diharapkan untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dilakukan secara konsisten sehingga jajaran Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mampu meningkatkan kemampuan dan menggali secara inovatif kegiatan produktif yang dapat meningkatkan akses, mutu dan tata kelola pendidikan, memberdayakan, mengembangkan pemuda serta membudayakan dan meningkatkan prestasi olahraga, meningkatkan pelayanan dan menggerakkan investasi guna mengelola sumber daya kepemudaan dan olahraga.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai amanat UUD 45, maka seluruh elemen penyelenggara negara/pengelola pemerintahan wajib melakukan pembangunan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di Bidang Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mempunyai tanggungjawab besar terkait orientasi



pembangunan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk tercapainya target sasaran, tujuan, program dan kegiatan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana 2018-2023.

Searah dengan RPJMD Semesta Berencana 2018-2023 maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menjabarkan Rencana Strategis Semesta Berencana 2018-2023 sebagai bentuk implementatif terkait capaian tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Berdasarkan isu-isu strategis urusan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yaitu :

1. Pemerataan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus antar Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung wajib belajar 12 tahun.
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan
3. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
4. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam rangka peningkatan keterserapan tamatan SMK diterima bekerja pada dunia usaha/dunia industri
5. Revitalisasi SMK (kerjasama dengan DU/DI, penyelarasan kurikulum dengan DU/DI, peningkatan profesionalisme Guru dan Tendik, peningkatan sarana dan prasarana, tata Kelola kelembagaan dan sertifikasi kompetensi.
6. Penguatan pendidikan karakter dan pengembangan pendidikan *pasraman* berbasis kearifan lokal Bali dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun karakter dan budi pekerti.
7. Peningkatan kualitas dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan serta penataan distribusi guru untuk memperoleh rasio ketersediaan guru dalam kondisi ideal di Provinsi Bali
8. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan kepemudaan untuk mendukung kemandirian dan daya saing pemuda dalam pembangunan.
9. Memaksimalkan upaya pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga di Provinsi Bali.

Permasalahan pembangunan sejati adalah adanya “*gap expectation*” kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagai organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk tercapainya Visi : NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju “BALI



ERA BARU” melalui penjabaran Misi-Misi RPJMD Semesta Berencana 2018-2023 yaitu :

- Misi 4 :
Memastikan Tersedianya Pelayanan Pendidikan yang Terjangkau, Merata, Adil, dan Berkualitas serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.
- Misi 5 :
Mengembangkan Sistem Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berbasis Keagamaan Hindu dalam Bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
- Misi 6 :
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tinggi yaitu Berkualitas dan Berintegritas; Bermutu, Profesional dan Bermoral Serta Memiliki Jati Diri yang Kokoh yang Dikembangkan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Krama Bali.
- Misi 11 :
Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Sekala Dan Niskala Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat Sat Kertih Yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, Dan Jagat Kertih.

Dari keempat Misi tersebut di atas, selanjutnya, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali memformulasikannya menjadi 4 (empat) tujuan yaitu :

1. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas.
2. Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal.
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi.
4. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi

Berdasarkan misi tersebut diatas, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sesuai dengan pasal 1 ayat 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun. Rancangan Awal Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali merupakan bahan masukan untuk Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2022. Melalui Forum Perangkat Daerah Renja Awal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali disempurnakan menjadi Rancangan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi



Bali. Rancangan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali selanjutnya sebagai bahan Musrenbang RKPD. Setelah RKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, maka Rancangan Akhir Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali disempurnakan selanjutnya dikirim Kepada Bappeda Litbang Provinsi Bali untuk di Verifikasi. Bila hasil verifikasi dari Bappeda dan Litbang Provinsi Bali memandang bahwa Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sinkron dengan RKPD, maka Bappeda Litbang Provinsi Bali mengirim Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali ke Gubernur melalui Sekretariat Daerah untuk ditetapkan menjadi Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali selanjutnya menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali 2022 diawali dengan mengajukan rancangan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; selanjutnya Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah dilakukan secara internal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dengan mengundang Bappeda Litbang Provinsi Bali. Materi orientasi meliputi: tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali 2022, penyamaan persepsi tentang tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah, dan kesiapan Data SIPD. Bersamaan dengan orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Tim menyusun agenda kerja dengan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi Tim.

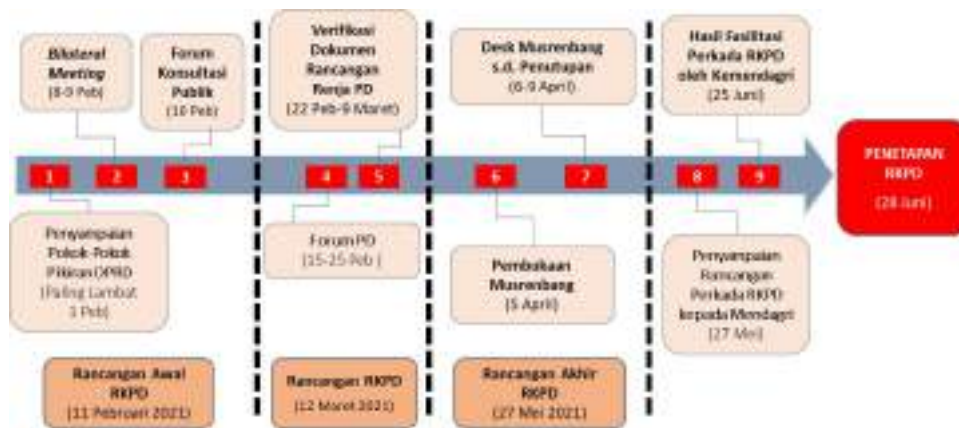
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 yang menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Periode 2018-2023 dan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai pelaksanaan pola pembangunan yang memakai pendekatan satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Hal ini bermakna suatu haluan pembangunan yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara *sakala niskala* menuju tata kehidupan Bali Era Baru sesuai prinsip Trisakti; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana mencakup upaya dan strategi untuk menjaga keharmonisan dan kesucian alam, manusia, dan kebudayaan Bali dalam menghadapi tantangan dan permasalahan bersifat lokal, nasional, dan internasional. Secara filosofis RPJMD Semesta Berencana dilandasi oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang selanjutnya dijabarkan dan dioperasionalkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual maupun kolektif (*jana kerthi*). Filosofi dan kearifan lokal ini terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali.

Proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 telah dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) *Bilateral Meeting*; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangda Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD. Secara lengkap proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2022 disajikan dalam Gambar 1.1.



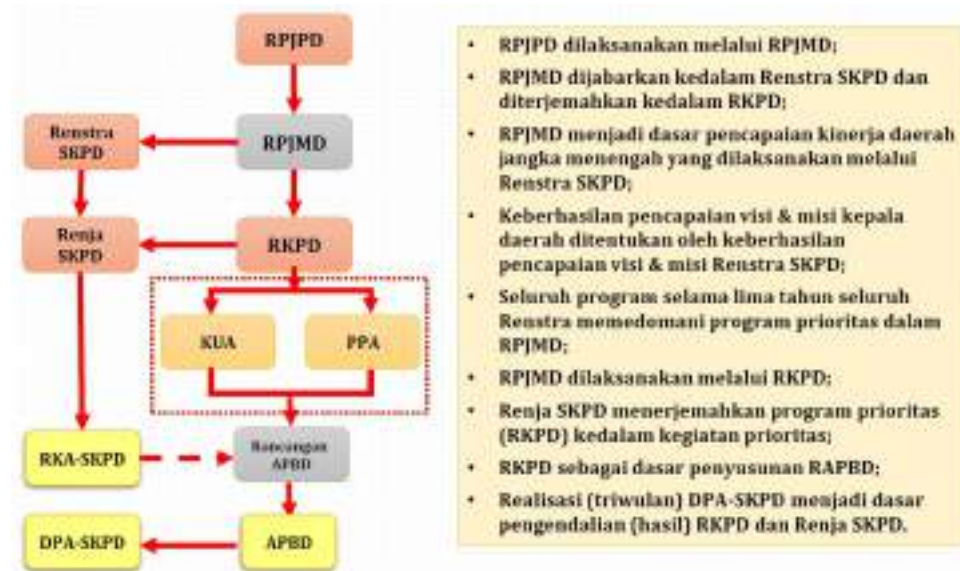
Gambar 1.1.

Proses Penyusunan RKPDP Semester Berencana Provinsi Bali Tahun 2022

Sebagai penjabaran RPJMD Semester Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, penyusunan RKPDP Semester Berencana Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*), serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratis dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi *money follow programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. RKPDP Semester Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. RKPDP Semester Berencana merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Semester Berencana dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPDP Semester Berencana memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
3. RKPDP Semester Berencana merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPDP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4. RKPDP Semester Berencana merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDP Semester Berencana ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD Semester Berencana sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kedudukan RKPD Semesta Berencana tahun 2022 sebagai penjabaran tahunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah hingga tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD secara lebih jelas ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2.
Kedudukan RKPD Dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan
Pembangunan Daerah

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2022 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;



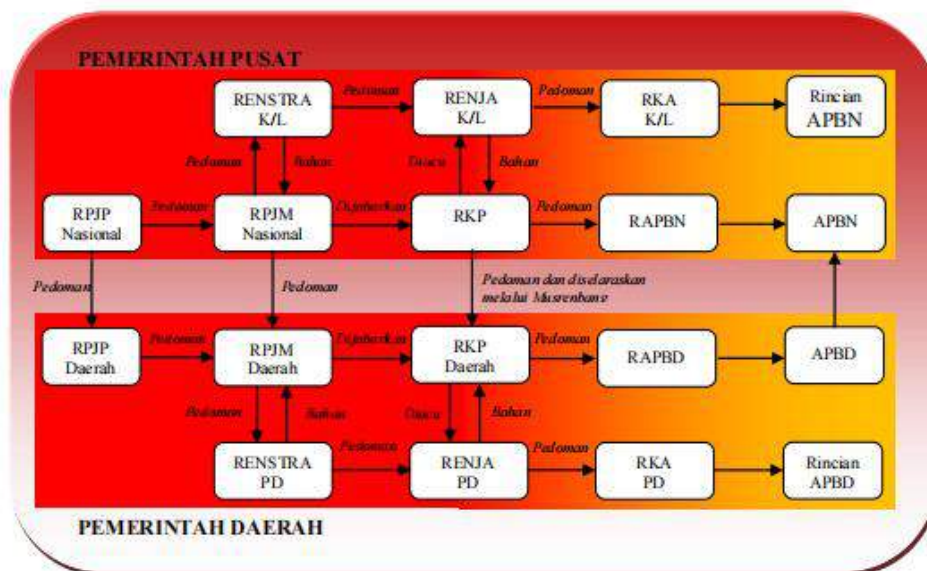
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 17) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- 18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPD Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- 19) Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.
- 20) Surat Edaran Nomor 2354 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun 2022.

Hubungan dokumen RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.3 Sebagai berikut :



Gambar 1.3.
Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap RKPD Tahun 2022



Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 juga disusun dengan menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses sistematis, RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

1.3.1 Hubungan RKPD dan RKP Tahun 2022

Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). RKP Tahun 2022 merupakan RKP tahun kedua yang merupakan penjabaran tahunan RPJMN 2020-2024. Keterkaitan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan penyelarasan perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian dan Lembaga, sehingga menjadi dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.3.2 Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan

RPJPD Semesta Berencana Tahun 2005-2025 sebagai rencana pembangunan jangka panjang telah terintegrasi dengan RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang dalam RPJPD dituangkan secara spasial ke dalam struktur ruang dan pola ruang pembangunan. Hal ini pula yang dijadikan dasar dalam penyusunan 8 arah pengembangan wilayah pada RPJMD serta arah kebijakan pembangunan pada RKPD.

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Provinsi Bali dan memberikan arah program strategis Provinsi Bali bagi Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan wujud pembangunan kewilayahan melalui pendekatan secara tematik, holistik, integratif



dan berbasis spasial yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah.

1.3.3 Hubungan RKPD dan RPJMD Provinsi Bali 2018-2023

Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan penjabaran RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Disamping itu memuat juga penjabaran indikator kinerja tahunan sesuai dengan proyeksi dan target yang tertuang di dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018- 2023 tahun berkenan (tahun 2022).

1.3.4 Hubungan RKPD, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022, agar terwujud keselarasan antara perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota. Pemilahan pelaksanaan urusan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing masing.

1.4 Maksud dan Tujuan.

Sebagaimana diuraikan di depan bahwa Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah harus disinkronisasikan dengan RKPD, dengan demikian penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali 2022 dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2018-2023 khususnya Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2022. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2022. Setelah RKPD ditetapkan,



maka Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali 2022 akan disesuaikan pada RKPD tersebut.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali 2022 adalah :

- 1) Menjabarkan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terutama pada tahun 2022.
- 2) Merancang program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali tahun 2022.
- 3) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2022 dengan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
- 4) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2022 dengan RKPD tahun 2022.
- 5) Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022 disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra dalam rangka pencapaian target kinerja.
- 6) Tujuan tersusunnya Renja ini adalah untuk menjamin konsistensi keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dan memberikan pedoman bagi seluruh bidang lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target sasaran Renstra yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rancangan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2022

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, kewenangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas



Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Pada Bab ini diuraikan tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI

Pada Bab III Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, dan 3) Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI

Pada bab IV Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan antara lain catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI TAHUN 2021

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Pendidikan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali tahun 2021 berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Adapun tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pembinaan bahasa, aksara dan sastra yang menjadi kewenangan Daerah
3. Penyelenggaraan administrasi bidang pendidikan
4. Penyelenggaraan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi
7. Melaksanakan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Provinsi
8. Menyelenggarakan administrasi Dinas bidang kepemudaan dan olahraga
9. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas
10. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.



Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagai organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas membantu Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk tercapainya Visi : **NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju “BALI ERA BARU”** melalui penjabaran Misi-Misi RPJMD Semesta Berencana 2018-2023 yaitu :

- Misi 4 :
Memastikan Tersedianya Pelayanan Pendidikan yang Terjangkau, Merata, Adil, dan Berkualitas serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.
- Misi 5 :
Mengembangkan Sistem Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Berbasis Keagamaan Hindu dalam Bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
- Misi 6 :
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Tinggi yaitu Berkualitas dan Berintegritas; Bermutu, Profesional dan Bermoral Serta Memiliki Jati Diri yang Kokoh yang Dikembangkan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Krama Bali.
- Misi 11 :
Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali Secara Sekala dan Niskala Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat Sad Kertih Yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.

Dari keempat Misi tersebut di atas, selanjutnya, Dinas Pendidikan Provinsi Bali memformulasikannya menjadi 4 (empat) Tujuan yaitu :

1. Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas.
2. Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal.
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi.
4. Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi.

I. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung Bidang prioritas kedua yaitu Kesehatan dan Pendidikan dengan sasaran meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas sebanyak 11 program, 30 kegiatan dan 138 sub kegiatan, sebagai berikut:



Tabel 2.1.

Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
2	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
I	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
2	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru
3	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
4	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
5	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
6	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
7	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
8	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
9	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
10	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
11	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
12	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
13	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
14	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
15	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
16	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
17	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah
18	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
19	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas
20	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
21	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
22	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas
23	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
24	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
25	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
II	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
2	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah



3	Sub KegiatanPembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
4	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa
5	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
6	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
7	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
8	Sub Kegiatan Rehabiltasi Fasilitas Parkir
9	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
10	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
11	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
12	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
13	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
14	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
15	Sub KegiatanPemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
16	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
17	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
18	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
19	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
20	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
21	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
22	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
23	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
24	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
25	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
26	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
III	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus
1	Sub KegiatanPenambahan Ruang Kelas Sekolah
2	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
3	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
4	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
6	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
7	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah
8	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
9	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah
10	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
12	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
13	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik



16	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
17	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
18	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
19	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
20	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
C	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
I	Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
1	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
2	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
I	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
E	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
I	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
II	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi
3	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
III	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
1	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
F	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
I	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
II	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
III	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
IV	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
I	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
2	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
II	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
2	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
II	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
III	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
IV	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
I	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
1	Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
2	Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah



3	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
II	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
1	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
C	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
I	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1	Sub Kegiatan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi

II. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Capaian Kinerja

Pada tahun 2021 Disdikpora Provinsi Bali telah melaksanakan 30 kegiatan, 138 sub kegiatan dari 11 program urusan layanan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang dikerjakan. Pembiayaan 30 kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Bali yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disdikpora Provinsi Bali Nomor DPA/A.1.01.2.19.0.00.01.0000/0012021 tanggal 4 Januari 2021 dengan Pagu Induk Rp. 2.319.730.943.012 (*Dua triliun tiga ratus sembilan belas miliar tujuh ratus tigas puluh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua belas rupiah*) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Disdikpora Provinsi Bali Nomor DPPA/B.1/1.01.2.19.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 29 Oktober 2021, terdiri dari 30 kegiatan, 138 sub kegiatan dan 11 program, dengan anggaran perubahan Rp 2.279.185.452.744 (*Dua triliun dua ratus tujuh puluh sembilan milyar seratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*).

Pelaksanaan program dan kegiatan Disdikpora Provinsi Bali tahun 2021 merupakan pelaksanaan lanjutan dari Rencana Strategis Semesta Berencana Disdikpora Provinsi Bali 2018-2023. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada prestasi kerja keluaran (*outcome/output*) program atau kegiatan. Penilaian berpatokan pada Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan sebagai kontrak kinerja antara Disdikpora Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditentukan dengan realisasi pencapaian kinerja berdasarkan data pendukung yang terukur. Berikut Hasil pengukuran pencapaian realisasi target yang diperoleh dari pengukuran kinerja dirinci sebagai berikut :



Tabel 2.2.

Capaian Kinerja Utama (sesuai Perjanjian Kinerja Kepala PD)

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2020	2021			TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA 2023	CAPAIAN S/D 2021 TERHADAP P 2023 (%)
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,90	88,90	80,90	91	81,25	99,56
2	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	1 Rata-rata lama sekolah	8,95	10,56	9.06	85.80	11,40	79,47
		2 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	82,51	100	75,80	75.80	100	75.80
		3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	43,73	15,41	43.88	284,75	35,55	123,43
		4 Persentase Lulusan siswa SMK yang di terima bekerja di dunia usaha/ dunia industri	47,96	46,50	50,10	107,74	47,50	105,47
3	Terwujudnya Karakter Krama Bali Unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai - nilai kearifan lokal	-	50,87	56.90	111.85	51,87	109,70
4	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang Unggul dan berdaya saing tinggi	Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	-	50	142	284	110	129

Sumber : Buku Profil dan BPS

Sesuai uraian tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target yang direncanakan dalam tahun 2021 untuk masing-masing sasaran strategis dengan indikator pengukurannya jika dibandingkan dengan realisasinya terdapat 4 (empat) indikator yang telah melampaui target yang telah ditetapkan dan 3 (tiga) indikator yang belum memenuhi capaian target.



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terdapat 1 (satu) indikator APM Pendidikan Menengah yang mengalami penurunan capaian dari tahun sebelumnya.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan sasaran strategis tersebut dilakukan analisis keberhasilan/kegagalan beserta solusi yang dilakukan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	1 Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88,90	80,90	91	Belum mencapai target karena adanya penyesuaian nomenklatur dan keterbatasan sumber daya aparatur	Melakukan upaya perbaikan terhadap proses perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja, memperkuat SDM, serta mengintensifkan koordinasi dan konsultasi
2	Terwujudnya wajib belajar 12 Tahun yang berkualitas	1 Rata-rata lama sekolah	10,56	9.06	85.80	Belum mencapai target karena masih terdapat siswa yang putus sekolah	- Peningkatan Akses Pendidikan melalui bantuan sarana prasarana sekolah (USB, RKB), pemberian dana pendamping BOSDA, mengupayakan bantuan dana pendidikan khususnya bagi siswa kurang mampu untuk menekan terjadinya siswa putus sekolah - Berkoordinasi dengan Disdik Kabupaten/Kota untuk mengarahkan siswa yang putus sekolah agar melanjutkan ke Pendidikan Paket A, B, C
		2 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100	75,80	75.80	Belum tercapainya APM Pendidikan Menengah 100% akibat belum tercapainya APM Pendidikan Dasar 100%, dan masih ada siswa putus sekolah akibat kemampuan ekonomi	- Berkoordinasi lebih intensif dengan Disdik Kabupaten/Kota agar pencapaian APM Pendidikan Dasar mencapai 100% (menuntaskan Wajib 9 Tahun) yang juga berkontribusi dalam pencapaian APM Pendidikan Menengah - Mengupayakan bantuan dana pendidikan khususnya bagi siswa kurang mampu untuk



							menekan terjadinya siswa putus sekolah
		3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	15,41	43.88	284,75	Melebihi target
		4	Persentase Lulusan siswa SMK yang di terima bekerja di dunia usaha /dunia industri	46,50	50,10	107,74	Melebihi target
3	Terwujudnya Karakter Krama Bali Unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	1	Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	50,87	56.90	111.85	Melebihi target
4	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang Unggul dan berdaya saing tinggi	1	Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	50	142	284	Melebihi target

Sesuai sajian tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) indikator yang capaiannya melebihi target dan terdapat 3 (tiga) indikator yang capaiannya belum memenuhi dari target yang telah ditetapkan, yaitu Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja, Rata-Rata Lama Sekolah, dan APM Pendidikan Menengah.

Upaya - upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja terhadap indikator Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja yaitu melalui perbaikan dan penyempurnaan terhadap proses perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja, memperkuat SDM, serta lebih intensif dalam melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan APM Pendidikan Menengah yaitu dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Disdik Kabupaten/Kota untuk bersama-sama dapat menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, memberikan bantuan sarana prasarana sekolah baik berupa pembangunan Unit Sekolah Baru dan Penambahan Ruang Kelas Baru sehingga diharapkan dapat lebih memudahkan akses bagi siswa untuk bersekolah, pemberian dana pendamping BOSDA untuk membantu kebutuhan biaya operasional sekolah



dan biaya penunjang proses pembelajaran, dan mengusulkan bantuan dana pendidikan melalui PIP khusus bagi siswa kurang mampu.

2. Realisasi Anggaran

Berikut kami sampaikan rencana dan realisasi anggaran yang dijabarkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Disdikpora Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4.
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.205.332.082.601,00	1.943.265.458.293,18	88,12%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.569.961.536.975,00	1.479.403.103.404,65	94,23%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.206.950,00	16.173.400,00	88,83%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.682.100,00	6.533.400,00	85,05%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.610.150,00	3.341.900,00	92,57%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.955.200,00	2.935.500,00	99,33%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.959.500,00	3.362.600,00	84,92%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.561.218.001.366,00	1.471.023.378.727,65	94,22%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	885.668.828.786,00	795.480.822.007,65	89,82%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	105.138.580,00	98.869.220,00	94,04%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.685.000,00	44.482.500,00	99,55%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.400.000,00	5.256.000,00	97,33%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	675.393.949.000,00	675.393.949.000,00	100,00%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	61.370.000,00	57.739.250,00	94,08%
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	61.370.000,00	57.739.250,00	94,08%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.718.570,00	77.211.070,00	67,30%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.803.900,00	36.250.000,00	91,07%



	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	74.914.670,00	40.961.070,00	54,68%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.161.163.505,00	1.007.979.635,00	86,81%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	614.921.205,00	536.746.810,00	87,29%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	77.605.000,00	77,61%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.708.300,00	49.660.875,00	55,36%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	47.250.000,00	46.780.000,00	99,01%
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	39.960.000,00	39.060.000,00	97,75%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	269.324.000,00	258.126.950,00	95,84%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	99.519.530,00	99,52%
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.519.530,00	99,52%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.178.852.056,00	6.098.415.219,00	98,70%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.160.000,00	12.160.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	554.571.000,00	502.943.271,00	90,69%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.612.121.056,00	5.583.311.948,00	99,49%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.109.224.528,00	1.022.686.573,00	92,20%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	525.914.528,00	445.355.845,00	84,68%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	195.000.000,00	194.455.100,00	99,72%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	388.310.000,00	382.875.628,00	98,60%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	635.159.693.596,00	463.760.922.193,53000	73,01%
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	309.517.958.646,00	149.172.369.015,53	48,20%
	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	41.173.875.872,00	39.373.210.786,00	95,63%
	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	14.633.060.896,00	13.891.682.198,53	94,93%
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	557.202.300,00	409.088.000,00	73,42%
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	318.324.500,00	285.922.000,00	89,82%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.812.054.100,00	1.285.258.300,00	70,93%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.827.562.400,00	1.226.821.582,00	67,13%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.293.678.000,00	958.169.465,00	74,07%



	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	649.801.000,00	508.105.000,00	78,19%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	382.684.000,00	296.691.000,00	77,53%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	1.323.410.100,00	1.084.442.750,00	81,94%
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	286.233.790,00	228.449.334,00	79,81%
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	537.073.000,00	187.889.458,00	34,98%
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.695.247.700,00	1.181.775.350,00	69,71%
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	864.002.400,00	822.539.000,00	95,20%
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.386.751.000,00	1.208.668.000,00	87,16%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	2.182.700.655,00	1.764.546.580,00	80,84%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah	31.550.000,00	31.550.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	89.276.100,00	87.232.400,00	97,71%
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	89.593.400,00	46.637.475,00	52,05%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	44.623.167.052,00	42.967.671.319,00	96,29%
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas	11.494.000,00	10.759.000,00	93,61%
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	812.097.680,00	649.071.696,00	79,93%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	192.907.118.701,00	40.665.321.122,00	21,08%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	30.000.000,00	867.200,00	2,89%
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	301.070.294.201,00	292.039.189.571,00	97,00%
	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	13.170.834.000,00	12.990.647.070,00	98,63%
	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.849.200.000,00	1.159.044.900,00	62,68%
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa	12.041.536.000,00	8.675.978.800,00	72,05%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.072.000.000,00	1.054.852.172,00	98,40%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	150.690.000,00	147.870.630,00	98,13%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	1.236.164.000,00	1.168.258.064,00	94,51%
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	544.073.594,00	451.376.320,00	82,96%
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	560.694.000,00	495.746.470,00	88,42%
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	549.268.800,00	539.645.000,00	98,25%



	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	66.413.000,00	62.195.771,00	93,65%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	1.346.018.994,00	866.525.600,00	64,38%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	353.939.006,00	194.938.260,00	55,08%
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	2.392.818.269,00	1.166.247.930,00	48,74%
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	9.897.906.000,00	8.782.992.480,00	88,74%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	68.091.740,00	48.491.740,00	71,22%
	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	89.173.750,00	25.818.600,00	28,95%
	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	29.080.665,00	9.060.000,00	31,15%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	45.660.792.862,00	44.359.832.502,00	97,15%
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	985.549.135,00	833.635.876,00	84,59%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	208.994.366.386,00	208.994.366.386,00	100,00%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	11.684.000,00	11.665.000,00	99,84%
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	24.571.440.749,00	22.549.363.607,00	91,77%
	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	2.716.542.976,00	2.703.398.014,00	99,52%
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	234.300.000,00	187.818.250,00	80,16%
	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1.666.706.640,00	1.607.660.590,00	96,46%
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	854.028.897,00	698.378.030,00	81,77%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	952.339.610,00	789.587.354,00	82,91%
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	154.079.860,00	149.785.705,00	97,21%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	31.875.000,00	31.200.000,00	97,88%
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	496.690.675,00	140.963.530,00	28,38%
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	111.280.300,00	70.525.365,00	63,38%
	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	22.000.000,00	7.700.000,00	35,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	521.504.750,00	453.778.513,00	87,01%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	67.409.900,00	49.945.888,00	74,09%



	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100.833.570,00	91.440.400,00	90,68%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.590.633.416,00	5.545.037.852,00	99,18%
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	334.064.250,00	305.710.550,00	91,51%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	10.703.524.505,00	9.703.452.716,00	90,66%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	13.626.400,00	12.980.850,00	95,26%
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	210.852.030,00	101.432.695,00	48,11%
	Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	210.852.030,00	101.432.695,00	48,11%
	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.948.590,00	26.261.300,00	65,74%
	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	170.903.440,00	75.171.395,00	43,98%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	43.099.970.300,00	42.123.461.000,00	97,73%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	199.970.300,00	178.133.100,00	89,08%
	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	199.970.300,00	178.133.100,00	89,08%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	199.970.300,00	178.133.100,00	89,08%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	41.800.000.000,00	40.845.327.900,00	97,72%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	41.700.000.000,00	40.745.327.900,00	97,71%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	2.700.000.000	2.500.000.000,00	92,59%
	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	39.000.000.000	38.245.327.900,00	98,06%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	50.000.000	50.000.000,00	100,00%



6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.345.635.016,00	3.074.397.365,00	91,89%
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.538.946.821,00	2.306.125.965,00	90,83%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.022.575.976,00	1.792.657.788,00	88,63%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.022.575.976,00	1.792.657.788,00	88,63%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.893.965,00	75.170.067,00	97,76%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.499.165,00	56.684.067,00	98,58%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.464.800,00	1.916.000,00	77,73%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.130.000,00	13.770.000,00	97,45%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.764.480,00	375.764.510,00	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.764.480,00	374.764.510,00	100,00%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.712.400,00	62.533.600,00	98,15%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.987.400,00	58.808.600,00	98,03%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.325.000,00	2.325.000,00	100,00%
8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	806.688.195,00	768.271.400,00	95,24%
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	505.810.270,00	477.517.850,00	94,41%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	489.635.270,00	462.453.800,00	94,45%
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	16.175.000,00	15.064.050,00	93,13%
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	300.877.925,00	290.753.550,00	96,64%



	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	294.153.310,00	285.037.250,00	96,90%
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	6.724.615,00	5.716.300,00	85,01%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	27.407.764.827,00	25.630.507.256,00	93,52%
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.275.721.315,00	529.059.172,00	23,25%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.985.097.677,00	1.694.469.397,00	85,36%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.985.097.677,00	1.694.469.397,00	85,36%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.154.950,00	24.865.750,00	91,57%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.995.950,00	13.920.750,00	92,83%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.339.000,00	4.305.000,00	80,63%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	600.000,00	600.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.220.000,00	6.040.000,00	97,11%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.858.688,00	1.000.000,00	0,44%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.858.688,00	224.858.688,00	100,00%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.610.000,00	9.287.800,00	24,70%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.610.000,00	9.287.800,00	24,70%
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	36.510.000,00	28.550.300,00	78,20%
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	13.285.500,00	12.683.300,00	95,47%
	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	13.285.500,00	12.683.300,00	95,47%
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	23.224.500,00	15.867.000,00	68,32%
	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	23.224.500,00	15.867.000,00	68,32%
11	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	25.095.533.512,00	25.072.897.784,00	99,91%
	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.095.533.512,00	25.072.897.784,00	99,91%



	Sub Kegiatan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	25.095.533.512,00	25.072.897.784,00	99,91%
--	--	-------------------	-------------------	--------

Pagu Anggaran Belanja Disdikpora Provinsi Bali sebesar Rp. 2.279.185.452.744 setelah beberapa kali mengalami rasionalisasi/refocusing sebagai dampak pandemi Covid19 dan terserap sebesar Rp. 2.014.093.823.914 atau 88,37%. Sisa anggaran sebesar Rp. 265.091.628.830 atau 11,63% yang merupakan upaya efisiensi belanja untuk mengurangi defisit APBD Provinsi Bali.

Secara umum Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali dan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2021, sesuai daftar terlampir:

Tabel 2.5.
Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
Aspek Pelayanan Umum

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Ket
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Dasar									
1 Pendidikan									
1.2	Angka Partisipasi Kasar								
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Persentase (%)	105.9	106.688	109.38	107.48	100,56	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Persentase (%)	106.95	108.31	106.88	109.67	96,4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Persentase (%)	100.4	101.20	98.00	102.01	100,30	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan								
1.3.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A	Persentase (%)	24.55	24.84	23.49	25.14	24,80	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.3.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS/Paket B	Persentase (%)	11.73	12.02	11.69	12.32	21,78	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Ket
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3. 3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	23.41	23.7	23.89	24	38,59	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.4	Angka Partisipasi Murni								
1.4. 1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	96.06	100	99.63	100	92,06	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.4. 2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	84.54	100	88.72	100	79,22	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.4. 3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	73.15	100	73.21	100	82,51	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.5	Angka Partisipasi Sekolah								
1.5. 1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	99.56	99.56	99.71	99.56	99,21	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.5. 2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	97.92	97.92	97.72	97.92	95,52	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.5. 3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persentase (%)	82.35	82.35	82.60	82.35	71,44	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.6	Angka Putus Sekolah								
1.6. 1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase (%)	0.05	0.04	0.03	0.03	0,08	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Ket
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6. 2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase (%)	0.10	0.09	0.12	0.08	0,08	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.6. 3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0.25	0.24	0.55	0.23	0,06	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.7	Angka Kelulusan								
1.7. 1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.7. 2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.7. 3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	99.99	100	99.97	100	99,98	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.8	Angka Transisi (AT)								
1.8. 1	Angka Transisi (AT) SMP/MTs	Persentase (%)	96.24	97.3	96.73	98.36	98,74	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.8. 2	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	95.85	96.91	96.79	97.97	97,89	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.9	Fasilitas Pendidikan								
1.9. 1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase (%)	93.28	94.03	96.69	94.77	95,34	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Ket
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.14 .1	SD/MI	Persentase (%)	0.03	0.03	1.54	0.03	0,03	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.14 .2	SMP/MTS	Persentase (%)	0.09	0.09	2.01	0.09	0,09	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.14 .3	SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0.10	0.10	2.28	0.10	0,10	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.15	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persentase (%)	100.00	106.94	99.97	106.94	99,98	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persentase (%)	99.87	99.87	99.93	99.88	99,94	BPS	
1.17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase (%)	92.98	92.98	94.53	93.06	98,34	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.18	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV								
1.18 .1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)	Persentase (%)	87.96	75.19	98.86	75.88	76,85	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.18 .2	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)	Persentase (%)	93.16	94.08	94.31	95.00	94,86	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1.18 .3	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)	Persentase (%)	95.91	96.42	96.62	96.93	96,78	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Ket
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.18 .4	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	Persentase (%)	96.39	96.68	99.10	96.97	97,08	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
13 Kepemudaan dan Olah Raga									
13. 1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persenta se (%)	76	77	77	78	78	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
13. 2	Persentase Wirausaha Muda	Persenta se (%)	0.82	0.83	0.83	0.84	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
13. 3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persenta se (%)	51.2	52	52	54	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
13. 4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persenta se (%)	38.88	40	50	42	40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
13. 5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persenta se (%)	3.31	5	6.5	7.5	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		Sumber Data	Ket
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian	Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13. 6	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	924 Orang	177 Orang	180 orang	186 Orang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
13. 7	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah	20 cabor	22 cabor	24 cabor	24 cabor	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	



2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

Adapun Isu – Isu yang berkembang pada tahun 2022, berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Isu – isu di bidang Pendidikan :

1. Belum meratanya akses, mutu dan tata kelola antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
2. Belum optimalnya pemahaman peserta didik terhadap nilai nilai kearifan lokal
3. Belum optimalnya prestasi, kompetensi dan profesionalitas peserta didik di tingkat Nasional dan Internasional

Isu – isu di bidang Kepemudaan :

1. Kurangnya pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan kemitraan kegiatan Kepemudaan;
2. Kurangnya sarana dan prasarana Kepemudaan dalam pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan;
3. Kurangnya wadah dan kegiatan (wahana) untuk menuangkan minat, bakat, potensi, kreativitas dan inovasi pemuda.

Isu-isu di bidang Olahraga :

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
2. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang berstandarisasi;
3. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM bidang keolahragaan;
4. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
5. Kurangnya apresiasi dan penghargaan bagi SDM bidang keolahragaan yang berprestasi;

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Provinsi Bali baru disampaikan pada minggu ketiga bulan Januari 2021, sehingga penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali baru dilaksanakan pada minggu ke empat bulan Januari 2021. Sebelum menyusun Renja terlebih dahulu dilakukan Review Rancangan Awal RKPD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD diuraikan sebagai berikut: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terutama hasil capaian kinerja tahun 2020 dan kebutuhan tahun 2022. Alasan proses tersebut dilakukan; untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program dan kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan tahun 2022.



Hasil review dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali tahun 2022, perlu mengusulkan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarnya yang masih berbeda.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Forum Konsultasi Publik ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan pada saat Forum Perangkat Daerah;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek

Tabel 2.6.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Angaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		K	Rp		K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								2.205.332.082.601,00			1.943.265.458.293,18						
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja					88,9		1.569.961.536.975,00	80,9	1.479.403.103.404,65	91,00%	94,23%	80,9	1.479.403.103.404,65			DISDIKPORA
	1.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					8	dokumen	18.206.950,00	8	16.173.400,00	100,00%	88,83%	8	16.173.400,00			DISDIKPORA
	1.01.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu					5	dokumen	7.682.100,00	5	6.533.400,00	100,00%	85,05%	5	6.533.400,00			DISDIKPORA
	1.01.01.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun tepat waktu					-	-	0,00	0	0,00	-	0,00%	0	-			DISDIKPORA
	1.01.01.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun tepat waktu					-	-	0,00	0	0,00	-	0,00%	0	-			DISDIKPORA
	1.01.01.1.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun tepat waktu					1	dokumen	3.610.150,00	1	3.341.900,00	100,00%	92,57%	1	3.341.900,00			DISDIKPORA
	1.01.01.1.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun tepat waktu					1	dokumen	2.955.200,00	1	2.935.500,00	100,00%	99,33%	1	2.935.500,00			DISDIKPORA
	1.01.01.1.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja yang tersusun tepat waktu					1	dokumen	3.959.500,00	1	3.362.600,00	100,00%	84,92%	1	3.362.600,00			DISDIKPORA
	1.01.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah					-	-	0,00	-	0,00	-	0,00%	-	-			DISDIKPORA
	1.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah					100	persen	1.561.218.001.366,00	100	1.471.023.378.727,65	100,00%	94,22%	100	1.471.023.378.727,65			DISDIKPORA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		K	Rp		K	Rp				K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13	
	1.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar tepat waktu					100	persen	885.668.828.786,00	100	795.480.822.007,65	100,00%	89,82%	100	795.480.822.007,65			DISDIKPORA	
	1.01.01.1.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang diverifikasi					1000	dokumen	105.138.580,00	1000	98.869.220,00	100,00%	94,04%	1000	98.869.220,00			DISDIKPORA	
	1.01.01.1.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun					10	dokumen	44.685.000,00	10	44.482.500,00	100,00%	99,55%	10	44.482.500,00			DISDIKPORA	
	1.01.01.1.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen tanggapan pemeriksaan					2	dokumen	5.400.000,00	2	5.256.000,00	100,00%	97,33%	2	5.256.000,00			DISDIKPORA	
	1.01.01.1.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD	Jumlah sekolah SD dan SMP Negeri/Swasta se-Bali yang Menerima Dana BOS Pusat					2785	sekolah	675.393.949.000,00	2785	675.393.949.000,00	100,00%	100,00%	2785	675.393.949.000,00			DISDIKPORA	
	1.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan administrasi barang milik daerah					2	laporan	61.370.000,00	2	57.739.250,00	100,00%	94,08%	2	57.739.250,00			DISDIKPORA	
	1.01.01.1.03.04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jenis laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD					3	laporan	61.370.000,00	3	57.739.250,00	100,00%	94,08%	3	57.739.250,00			DISDIKPORA	
	1.01.01.1.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jenis laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD					0	laporan	-	0	0,00%	0,00%	0	-			DISDIKPORA		
	1.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah					100	persen	114.718.570,00	100	77.211.070,00	100,00%	67,30%	100	77.211.070,00			DISDIKPORA	
	1.01.01.1.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas berserta atribut yang tersedia dan siap digunakan					257	orang	39.803.900,00	257	36.250.000,00	100,00%	91,07%	257	36.250.000,00			DISDIKPORA	
	1.01.01.1.05.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian					266	laporan	74.914.670,00	25	40.961.070,00	9,40%	54,68%	25	40.961.070,00			DISDIKPORA	
	1.01.01.1.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimtek					0	orang	0,00	0	0,00%	0,00%	0	-			DISDIKPORA		
	1.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah					100	persen	1.161.163.505,00	100	1.007.979.635,00	100,00%	86,81%	100	1.007.979.635,00			DISDIKPORA	
	1.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia					47	jenis	614.921.205,00	47	536.746.810,00	100,00%	87,29%	47	536.746.810,00			DISDIKPORA	
	1.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia					2	jenis	100.000.000,00	2	77.605.000,00	100,00%	77,61%	2	77.605.000,00			DISDIKPORA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia					10	jenis	89.708.300,00	10	49.660.875,00	100,00%	55,36%	10	49.660.875,00		DISDIKPORA	
	1.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia					2	jenis	47.250.000,00	2	46.780.000,00	100,00%	99,01%	2	46.780.000,00		DISDIKPORA	
	1.01.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi					12	kali	39.960.000,00	12	39.060.000,00	100,00%	97,75%	12	39.060.000,00		DISDIKPORA	
	1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi					12	laporan	269.324.000,00	12	258.126.950,00	100,00%	95,84%	12	258.126.950,00		DISDIKPORA	
	1.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya layanan pengadaan barang milik daerah perangkat daerah					100	persen	100.000.000,00	100	99.519.530,00	100,00%	99,52%	100	99.519.530,00		DISDIKPORA	
	1.01.01.1.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan perencanaan yang disusun dengan baik dan tepat waktu					1	dokumen	100.000.000,00	1	99.519.530,00	100,00%	99,52%	1	99.519.530,00		DISDIKPORA	
	1.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah					100	persen	6.178.852.056,00	100	6.098.415.219,00	100,00%	98,70%	100	6.098.415.219,00		DISDIKPORA	
	1.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang teregistrasi					1000	surat	12.160.000,00	1000	12.160.000,00	100,00%	100,00%	1000	12.160.000,00		DISDIKPORA	
	1.01.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar tepat waktu					3	rekening	554.571.000,00	3	502.943.271,00	100,00%	90,69%	3	502.943.271,00		DISDIKPORA	
	1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan yang disediakan					6	jasa	5.612.121.056,00	6	5.583.311.948,00	100,00%	99,49%	6	5.583.311.948,00		DISDIKPORA	
	1.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah					100	persen	1.109.224.528,00	100	1.022.686.573,00	100,00%	92,20%	100	1.022.686.573,00		DISDIKPORA	
	1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan					21	unit	525.914.528,00	21	445.355.845,00	100,00%	84,68%	21	445.355.845,00		DISDIKPORA	
	1.01.01.1.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan dalam keadaan baik					1	unit	195.000.000,00	1	194.455.100,00	100,00%	99,72%	1	194.455.100,00		DISDIKPORA	
	1.01.01.1.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor dalam keadaan baik					8	jenis	388.310.000,00	8	382.875.628,00	100,00%	98,60%	8	382.875.628,00		DISDIKPORA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata lama sekolah					10,56	tahun	635.159.693.596,00	9,06	463.760.922.193,53000	85,80%	73,01%	9,06	463.760.922.193,53		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah					100	persen	309.517.958.646,00	75,8	149.172.369.015,53	75,80%	48,20%	75,8	149.172.369.015,53		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang di bangun dan siap digunakan					6	sekolah	41.173.875.872,00	6	39.373.210.786,00	100,00%	95,63%	6	39.373.210.786,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan					30	Ruang Kelas	14.633.060.896,00	30	13.891.682.198,53	100,00%	94,93%	30	13.891.682.198,53		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.06	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang dibangun siap digunakan					1	ruangan	557.202.300,00	1	409.088.000,00	100,00%	73,42%	1	409.088.000,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang dibangun siap digunakan					1	ruangan	318.324.500,00	1	285.922.000,00	100,00%	89,82%	1	285.922.000,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.14	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun dan siap digunakan					5	sekolah	1.812.054.100,00	5	1.285.258.300,00	100,00%	70,93%	5	1.285.258.300,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.19	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan					5	Ruang Kelas	1.827.562.400,00	5	1.226.821.582,00	100,00%	67,13%	5	1.226.821.582,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.20	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU direhabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan					3	ruangan	1.293.678.000,00	3	958.169.465,00	100,00%	74,07%	3	958.169.465,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.21	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang di Rehabilitasi Sedang/Berat dan siap digunakan					2	ruangan	649.801.000,00	2	508.105.000,00	100,00%	78,19%	2	508.105.000,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.31	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang di rehabilitasi dan siap digunakan					3	sekolah	382.684.000,00	3	296.691.000,00	100,00%	77,53%	3	296.691.000,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.36	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeluer sekolah yang diadakan dan siap digunakan					5	sekolah	1.323.410.100,00	5	1.084.442.750,00	100,00%	81,94%	5	1.084.442.750,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.37	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan dan siap digunakan					31	sekolah	286.233.790,00	31	228.449.334,00	100,00%	79,81%	31	228.449.334,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.38	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan dan siap digunakan					9	sekolah	537.073.000,00	9	187.889.458,00	100,00%	34,98%	9	187.889.458,00		DISDIKPORA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	1.01.02.1.01.39	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan					6	sekolah	1.695.247.700,00	6	1.181.775.350,00	100,00%	69,71%	6	1.181.775.350,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.40	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang terpenuhi					48	sekolah	864.002.400,00	48	822.539.000,00	100,00%	95,20%	48	822.539.000,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.41	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktek dan Peraga Peserta Didik sekolah yang diadakan dan siap digunakan					5	sekolah	1.386.751.000,00	5	1.208.668.000,00	100,00%	87,16%	5	1.208.668.000,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.42	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik					56	sekolah	2.182.700.655,00	56	1.764.546.580,00	100,00%	80,84%	56	1.764.546.580,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.43	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam kondisi baik					2	2 sekolah	31.550.000,00	2	31.550.000,00	100,00%	100,00%	2	31.550.000,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.46	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga siswa yang diadakan dan siap digunakan					0	-	0,00	0	-	0,00%	0,00%	0	-		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.48	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang tersusun tepat waktu					84	sekolah	89.276.100,00	84	87.232.400,00	100,00%	97,71%	84	87.232.400,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.49	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreatifitas					3	sekolah	89.593.400,00	3	46.637.475,00	100,00%	52,05%	3	46.637.475,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.50	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan					80	sekolah	44.623.167.052,00	80	42.967.671.319,00	100,00%	96,29%	80	42.967.671.319,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.51	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir					5	sekolah	11.494.000,00	5	10.759.000,00	100,00%	93,61%	5	10.759.000,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.52	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang terbina					84	sekolah	812.097.680,00	84	649.071.696,00	100,00%	79,93%	84	649.071.696,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.53	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah SMA Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS					160	sekolah	192.907.118.701,00	160	40.665.321.122,00	100,00%	21,08%	160	40.665.321.122,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.01.54	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan baik					160	sekolah	30.000.000,00	160	867.200,00	100,00%	2,89%	160	867.200,00		DISDIKPORA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	1.01.02.1.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase lulusan siswa SMK yang diterima berkerja dunia usaha / dunia industri					46,5	persen	301.070.294.201,00	50,1	292.039.189.571,00	107,74%	97,00%	50,1	292.039.189.571,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun dan siap digunakan					3	sekolah	13.170.834.000	3	12.990.647.070,00	100,00%	98,63%	3	12.990.647.070,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah penambahan Ruang Kelas Sekolah dan siap digunakan					2	ruang kelas	1.849.200.000	2	1.159.044.900,00	100,00%	62,68%	2	1.159.044.900,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.03	Sub KegiatanPembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun dan siap digunakan					-	ruang	0	-	0,00	0,00%	0,00%	#VALUE!	-		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah ruang praktik siswa yang dibangun siap digunakan					6	ruang	12.041.536.000	6	8.675.978.800,00	100,00%	72,05%	6	8.675.978.800,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.08	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang di Rehabilitasi dan siap digunakan					-	ruang	0	-	0,00	0,00%	0,00%	#VALUE!	-		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.10	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun dan siap digunakan					3	jenis	1.072.000.000	3	1.054.852.172,00	100,00%	98,40%	3	1.054.852.172,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.17	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang direhabilitasi dan siap digunakan					1	ruangan	150.690.000	1	147.870.630,00	100,00%	98,13%	1	147.870.630,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.24	Sub Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang direhabilitasi dan siap digunakan					-	paket	0	-	0,00	0,00%	0,00%	0	-		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.28	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeler sekolah yang diadakan dan siap digunakan					9	paket	1.236.164.000	9	1.168.258.064,00	100,00%	94,51%	9	1.168.258.064,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.29	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan dan siap digunakan					24	sekolah	544.073.594	24	451.376.320,00	100,00%	82,96%	24	451.376.320,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.30	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan dan siap digunakan					14	sekolah	560.694.000	14	495.746.470,00	100,00%	88,42%	14	495.746.470,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.31	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan					-	sekolah	0	-	0,00	0,00%	0,00%	0	-		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.32	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan					11	sekolah	549.268.800	11	539.645.000,00	100,00%	98,25%	11	539.645.000,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.33	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan dan siap digunakan					3	paket	66.413.000	3	62.195.771,00	100,00%	93,65%	3	62.195.771,00		DISDIKPORA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		K	Rp		K	Rp		K		
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13
	1.01.02.1.02.34	Sub KegiatanPemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik					28	sekolah	1.346.018.994	28	866.525.600,00	100,00%	64,38%	28	866.525.600,00			DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.35	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah bangunan Gedung dan Ruang Sekolah dalam kondisi baik					8	sekolah	353.939.006	8	194.938.260,00	100,00%	55,08%	8	194.938.260,00			DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.37	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah personil peserta didik yang tersedia					509	siswa	2.392.818.269	509	1.166.247.930,00	100,00%	48,74%	509	1.166.247.930,00			DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.38	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan dan siap digunakan					6	paket	9.897.906.000	6	8.782.992.480,00	100,00%	88,74%	6	8.782.992.480,00			DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.39	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa yang mengikuti proses belajar dan ujian dengan baik					1	sekolah	68.091.740	1	48.491.740,00	100,00%	71,22%	1	48.491.740,00			DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.40	Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang tersusun tepat waktu					1	dokumen	89.173.750	1	25.818.600,00	100,00%	28,95%	1	25.818.600,00			DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.41	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumah siswa yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreativitas					53	sekolah	29.080.665	53	9.060.000,00	100,00%	31,15%	53	9.060.000,00			DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.42	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan					670	guru	45.660.792.862	670	44.359.832.502,00	100,00%	97,15%	670	44.359.832.502,00			DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.43	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Keiuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan karir					-	sekolah	0	-	0,00	0,00%	0,00%	0	-			DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.45	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah dokumen menengah kejuruan yang terbina					1	dokumen	985.549.135	1	833.635.876,00	100,00%	84,59%	1	833.635.876,00			DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.46	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah sekolah SMK Negeri/Swasta se-Bali yang menerima dana BOS					163	sekolah	208.994.366.386	163	208.994.366.386,00	100,00%	100,00%	163	208.994.366.386,00			DISDIKPORA	
	1.01.02.1.02.47	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah dokumen pengelolaan dana BOS dengan baik					1	dokumen	11.684.000	1	11.665.000,00	100,00%	99,84%	1	11.665.000,00			DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pedidikan Khusus					15,41	persen	24.571.440.749,00	43,88	22.549.363.607,00	284,75%	91,77%	43,88	22.549.363.607,00			DISDIKPORA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	1.01.02.1.03.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan					3	sekolah	2.716.542.976	3	2.703.398.014,00	100,00%	99,52%	3	2.703.398.014,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun dan siap digunakan					1	sekolah	234.300.000	1	187.818.250,00	100,00%	80,16%	1	187.818.250,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.06	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun dan siap digunakan					2	ruang	1.666.706.640	2	1.607.660.590,00	100,00%	96,46%	2	1.607.660.590,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.08	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun dan siap digunakan					3	sekolah	854.028.897	3	698.378.030,00	100,00%	81,77%	3	698.378.030,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi dan siap digunakan					3	sekolah	952.339.610	3	789.587.354,00	100,00%	82,91%	3	789.587.354,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.24	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi dan siap digunakan					1	sekolah	154.079.860	1	149.785.705,00	100,00%	97,21%	1	149.785.705,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.35	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeluer sekolah yang diadakan dan siap digunakan					1	sekolah	31.875.000	1	31.200.000,00	100,00%	97,88%	1	31.200.000,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.36	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Sekolah yang mengadakan Alat Rumah Tangga Sekolah dan siap digunakan					12	sekolah	496.690.675	12	140.963.530,00	100,00%	28,38%	12	140.963.530,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.37	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah yang mengadakan perlengkapan sekolah dan siap digunakan					7	sekolah	111.280.300	7	70.525.365,00	100,00%	63,38%	7	70.525.365,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.38	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang diadakan dan siap digunakan					6	sekolah	22.000.000	6	7.700.000,00	100,00%	35,00%	6	7.700.000,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.39	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan					-	sekolah	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	-		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.40	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan dan siap digunakan					-	sekolah	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	-		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.41	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Sekolah yang memiliki gedung dan ruangan dalam kondisi baik					12	sekolah	521.504.750	12	453.778.513,00	100,00%	87,01%	12	453.778.513,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.42	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah dalam kondisi baik					-	sekolah	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	-		DISDIKPORA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	1.01.02.1.03.46	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					12	sekolah	67.409.900	12	49.945.888,00	100,00%	74,09%	12	49.945.888,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.48	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah sekolah yang mengembangkan minat, bakat dan kreativitas siswa					14	sekolah	100.833.570	14	91.440.400,00	100,00%	90,68%	14	91.440.400,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.49	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan					12	sekolah	5.590.633.416	12	5.545.037.852,00	100,00%	99,18%	12	5.545.037.852,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.51	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah tata kelola standar pelayanan minimal PK dan PLK					14	sekolah	334.064.250	14	305.710.550,00	100,00%	91,51%	14	305.710.550,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.52	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan Baik					14	sekolah	10.703.524.505	14	9.703.452.716,00	100,00%	90,66%	14	9.703.452.716,00		DISDIKPORA	
	1.01.02.1.03.53	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Dana BOS Pendidika Khusus					12	sekolah	13.626.400	0	12.980.850,00	0,00%	95,26%	0	12.980.850,00		DISDIKPORA	
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan					86	persen	210.852.030,00	100	101.432.695,00	116,28%	48,11%	100	101.432.695,00		DISDIKPORA	
	1.01.04.1.01	Kegiatan Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase Guru dan Tenaga Pendidikan yang bersertifikasi					52,62	persen	210.852.030,00	47,64	101.432.695,00	90,54%	48,11%	47,64	101.432.695,00		DISDIKPORA	
	1.01.04.1.01.01	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Pemetaan Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus					2	dokumen	39.948.590	2	26.261.300,00	100,00%	65,74%	2	26.261.300,00		DISDIKPORA	
	1.01.04.1.01.02	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus					3	dokumen	170.903.440	3	75.171.395,00	100,00%	43,98%	3	75.171.395,00		DISDIKPORA	
	2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								43.099.970.300,00	-	42.123.461.000,00	0,00%	97,73%	0	42.123.461.000,00		DISDIKPORA	
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berprestasi					20	persen	199.970.300,00	0	178.133.100,00	0,00%	89,08%	0	178.133.100,00		DISDIKPORA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	2.19.02.1.01	Kegiatan Penyiapan, Peningkatan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya prestasi dan daya saing pemuda					100	persen	199.970.300,00	100	178.133.100,00	100,00%	89,08%	100	178.133.100,00		DISDIKPORA	
	2.19.02.1.01.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Penabir Bendera	Jumlah peserta seleksi Paskibraka					18	orang	199.970.300,00	18	178.133.100,00	100,00%	89,08%	18	178.133.100,00		DISDIKPORA	
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah medali yang diperoleh atlet tingkat regional, nasional dan internasional					50	medali	41.800.000.000,00	142	40.845.327.900,00	284,00%	97,72%	142	40.845.327.900,00		DISDIKPORA	
	2.19.03.1.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Meningkatnya prestasi olahraga pendidikan					100	persen	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0,00%	100,00%	0	50.000.000,00		DISDIKPORA	
	2.19.03.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah sarana prasarana cabang olahraga yang disediakan dan siap digunakan					1	cabor	50.000.000,00	1	50.000.000,00	100,00%	100,00%	1	50.000.000,00		DISDIKPORA	
	2.19.03.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga					100	persen	41.700.000.000,00	100	40.745.327.900,00	100,00%	97,71%	100	40.745.327.900,00		DISDIKPORA	
	2.19.03.1.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah kejuaraan tingkat provinsi					0	kali	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%	0	-		DISDIKPORA	
	2.19.03.1.02.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan					6	cabor	2.700.000.000	6	2.500.000.000,00	100,00%	92,59%	6	2.500.000.000,00		DISDIKPORA	
	2.19.03.1.02.03	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam berpartisipasi mengikuti Multi Event dan Single Event					6	cabor	39.000.000.000	6	38.245.327.900,00	100,00%	98,06%	6	38.245.327.900,00		DISDIKPORA	
	2.19.03.1.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Meningkatnya prestasi organisasi olahraga					100	persen	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100,00%	100,00%	100	50.000.000,00		DISDIKPORA	
	2.19.03.1.04.02	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga yang dibina					1	organisasi	50.000.000	1	50.000.000,00	100,00%	100,00%	1	50.000.000,00		DISDIKPORA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	2.19.03.1.04.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah kerjasama kemitraan olahraga dan sarana prasarana olahraga yang tersedia					0	lembaga	0	0	0,00%	0,00%	0	-			DISDIKPORA	
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi pramuka yang aktif					85	persen	1.100.000.000,00	80	1.100.000.000,00	94,12%	100,00%	80	1.100.000.000,00		DISDIKPORA	
	2.19.04.1.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pramuka pada satuan pendidikan					100	persen	1.100.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100,00%	100,00%	100	1.100.000.000,00		DISDIKPORA	
	2.19.04.1.01.05	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Kegiatan Kepramukaan di Provinsi Bali yang dapat diselenggarakan					25	kegiatan	1.100.000.000,00	25	1.100.000.000,00	100,00%	100,00%	25	1.100.000.000,00		DISDIKPORA	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								3.345.635.016,00		3.074.397.365,00	0,00%	91,89%	0	3.074.397.365,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja					88,9		2.538.946.821,00	80,9	2.306.125.965,00	91,00%	90,83%	80,9	2.306.125.965,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah					100	persen	2.022.575.976,00	100	1.792.657.788,00	100,00%	88,63%	100	1.792.657.788,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangan tepat waktu					14	orang	2.022.575.976,00	14	1.792.657.788,00	100,00%	88,63%	14	1.792.657.788,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah					100	persen	76.893.965,00	100	75.170.067,00	100,00%	97,76%	100	75.170.067,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Keadaan Baik					43	jenis	57.499.165,00	43	56.684.067,00	100,00%	98,58%	43	56.684.067,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang Tersedia					4	jenis	2.464.800,00	4	1.916.000,00	100,00%	77,73%	4	1.916.000,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia					3	jenis	2.800.000,00	3	2.800.000,00	100,00%	100,00%	3	2.800.000,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi					19	laporan	14.130.000,00	19	13.770.000,00	100,00%	97,45%	19	13.770.000,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah					100	persen	375.764.480,00	100	375.764.510,00	100,00%	100,00%	100	375.764.510,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat					700	surat	1.000.000,00	700	1.000.000,00	100,00%	100,00%	700	1.000.000,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor					10	orang	374.764.480,00	10	374.764.510,00	100,00%	100,00%	10	374.764.510,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah					100	persen	63.712.400,00	100	62.533.600,00	100,00%	98,15%	100	62.533.600,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan atau pakai					2	kendaraan	59.987.400,00	2	58.808.600,00	100,00%	98,03%	2	58.808.600,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel dalam keadaan baik					1	paket	1.400.000,00	1	1.400.000,00	100,00%	100,00%	1	1.400.000,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.01.1.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dalam keadaan baik					1	paket	2.325.000,00	1	2.325.000,00	100,00%	100,00%	1	2.325.000,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata lama sekolah					10,56	tahun	806.688.195,00	9,06	768.271.400,00	85,80%	95,24%	9,06	768.271.400,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.02.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah atas					100	persen	505.810.270,00	100	477.517.850,00	100,00%	94,41%	100	477.517.850,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.02.1.01.47	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada jenjang SMA					84	sekolah	489.635.270,00	84	462.453.800,00	100,00%	94,45%	84	462.453.800,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	1.01.02.1.01.51	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Pembuatan Konten Media Pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas					435	orang	16.175.000,00	435	15.064.050,00	100,00%	93,13%	435	15.064.050,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.02.1.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan					100	persen	300.877.925,00	100	290.753.550,00	100,00%	96,64%	100	290.753.550,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.02.1.02.39	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada jenjang SMK					53	sekolah	294.153.310,00	53	285.037.250,00	100,00%	96,90%	53	285.037.250,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1.01.02.1.02.43	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Pendukung Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK					1	dokumen	6.724.615,00	1	5.716.300,00	100,00%	85,01%	1	5.716.300,00		UPTD. Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	
	1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							27.407.764.827,00		25.630.507.256,00	0,00%	93,52%	0	25.630.507.256,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja					88,9		2.275.721.315,00	80,9	529.059.172,00	91,00%	23,25%	80,9	529.059.172,00		UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah					100	persen	1.985.097.677,00	100	1.694.469.397,00	100,00%	85,36%	100	1.694.469.397,00		UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya tepat waktu					13	orang	1.985.097.677,00	13	1.694.469.397,00	100,00%	85,36%	13	1.694.469.397,00		UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah					100	persen	27.154.950,00	100	24.865.750,00	100,00%	91,57%	100	24.865.750,00		UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
	1.01.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia dan siap digunakan					20	jenis 14.995.950,00	20	13.920.750,00	100,00%	92,83%	20	13.920.750,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia					4	jenis 5.339.000,00	4	4.305.000,00	100,00%	80,63%	4	4.305.000,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia					1	jenis 600.000,00	1	600.000,00	100,00%	100,00%	1	600.000,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi					18	laporan 6.220.000,00	18	6.040.000,00	100,00%	97,11%	18	6.040.000,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah					100	persen 225.858.688,00	100	1.000.000,00	100,00%	0,44%	100	1.000.000,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat					200	surat 1.000.000,00	200	1.000.000,00	100,00%	100,00%	200	1.000.000,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gaji yang dibayar tepat waktu					6	orang 224.858.688,00	6	224.858.688,00	100,00%	100,00%	6	224.858.688,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah					100	persen 37.610.000,00	100	9.287.800,00	100,00%	24,70%	100	9.287.800,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang layak jalan					1	unit 37.610.000,00	1	9.287.800,00	100,00%	24,70%	1	9.287.800,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal					50,87	36.510.000,00	56,9	28.550.300,00	111,85%	78,20%	56,9	28.550.300,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K		Rp		K	Rp		K	Rp		K		
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12	13
	1.01.03.1.01	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan menengah					100	persen	13.285.500,00	100	12.683.300,00	100,00%	95,47%	100	12.683.300,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.03.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan menengah yang tersusun					0	kompetensi dasar	0,00	0		0,00%	0,00%	0	-			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.03.1.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah buku pelajaran bahasa bali yang direview					0	buku	0,00	0		0,00%	0,00%	0	-			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.03.1.01.04	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Pendukung Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah					1	dokumen	13.285.500,00	1	12.683.300,00	100,00%	95,47%	1	12.683.300,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.03.1.02	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan khusus					100	persen	23.224.500,00	100	15.867.000,00	100,00%	68,32%	100	15.867.000,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.03.1.02.04	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Pendukung Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					1	dokumen	23.224.500,00	1	15.867.000,00	100,00%	68,32%	1	15.867.000,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Implementasi penggunaan bahasa, aksara dan sastra bali pada satuan pendidikan					70	persen	25.095.533.512,00	70	25.072.897.784,00	100,00%	99,91%	70	25.072.897.784,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.06.1.01	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan					100	persen	25.095.533.512,00	100	25.072.897.784,00	100,00%	99,91%	100	25.072.897.784,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	
	1.01.06.1.01.02	Sub Kegiatan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali					1	dokumen	25.095.533.512,00	1	25.072.897.784,00	100,00%	99,91%	1	25.072.897.784,00			UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Bali 2018-2023, maka untuk menyusun tujuan dan sasaran diperlukan Rancangan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Bali 2018-2023. Selanjutnya pada Pada Bab III Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, dan 3) Program dan Kegiatan

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan 7 agenda pembangunan nasional pada RPJMN IV 2020-2024, salah satunya adalah “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali serta isu-isu strategis yang berkembang, maka beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali adalah :

- a. Meningkatnya akses, mutu dan tata kelola pendidikan dalam rangka terwujudnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas menuju wajib belajar 12 tahun.
- b. Meningkatnya daya saing dan kemandirian pemuda
- c. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga

2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi Tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Bali 2014-2018, Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Bali 2018-2023, Rancangan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali maka, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



Provinsi Bali yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra. Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah :

- 1) Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas
- 2) Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal
- 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi
- 4) Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi

Sedangkan sasaran target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas
- 2) Terwujudnya wajib belajar 12 tahun
- 3) Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat pendidikan menengah dalam bentuk pasraman
- 4) Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali
- 5) Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi

3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA		
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		4. Fasilitas Kunjungan Tamu
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
		2. Penambahan Ruang Kelas Baru
		3. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
		4. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		5. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
		7. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
		8. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
	2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
		2. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
		3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
		5. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
		6. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
		7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
		8. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
	3. Pengelolaan Pendidikan Khusus	1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah
		2. Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
		3. Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
		4. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
		5. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus



		6. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus
		7. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
		8. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
		9. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
		10. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
5. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
	2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
	3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1. Standardisasi Organisasi Keolahragaan
		2. Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
6. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN		
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



		3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		2. Pemeliharaan Mebel
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
		2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
		2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN		
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
		2. Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
		3. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
	2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
3. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PENDIDIKAN, KEMEPUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BALI

TAHUN 2022

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali terlampir.



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun 2022 menjadi bahan materi pembangunan yang sangat strategis. Dengan mengetahui tercapai dan tidak tercapainya sasaran pembangunan ataupun adanya penyimpangan dalam orientasi pembangunan akan secara cepat dapat diketahui. Begitu pula halnya terkait dengan sistem penyusunan anggaran akan memiliki sebuah dokumen pendekatan yang nyata karena layak tidak layaknya sebuah kebijakan untuk dibiayai sangat tergantung dari hasil evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan.

Evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan harus berpedoman pada instrument yang jelas dan terukur dengan cermat. Mengingat keputusan atas kegiatan-kegiatan baru itu diarahkan untuk menjawab persoalan yang ditemui tahun sebelumnya. Sehingga tidak ada alasan untuk membuat kegiatan tanpa dasar perencanaan yang jelas.

Sisi penting yang perlu dicermati dari sistem penganggaran adalah kegiatan yang banyak belum tentu membutuhkan dana yang besar justru bisa terjadi sebaliknya. Jumlah kegiatan yang sedikit membutuhkan anggaran yang besar. Jadi, kebutuhan besar kecilnya anggaran sangat ditentukan oleh sifat dan jenis kegiatan itu sendiri. Umumnya, kegiatan yang bersifat belanja modal (pengadaan barang/fisik) membutuhkan anggaran yang lebih besar jika dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat nonfisik seperti pembinaan, perjalanan dinas, workshop, bimtek, dan sejenisnya.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										897.095.177.312		1.508.410.238.004	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										685.134.338.069		868.194.706.165	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										28.742.900		75.500.000	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	meningkatnya kualitaslaporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	6 dokumen	8 dokumen	24,533,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	70,000,000	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja yang tersusun tepat waktu	meningkatnya kualitas laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	81 nilai	1 dokumen	8 dokumen	4,209,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	5,500,000	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										673,597,000,342		842.397.504.165	
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan dibayar tepat waktu	Meningkatnya kualitas laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	6158 orang	100 persen	673.459.624.262	ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	841.387.504.165	
1	01	01	1.02	03	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah SPJ yang diverifikasi	Meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	1500 dokumen	100 persen	113,909,090	ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	500.000.000	
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	21 laporan	100 persen	23,466,990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	510.000.000	
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										100,000,000		125.000.000	
1	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah jenis laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD	meningkatnya kualitas laporan administrasi barang milik daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	3 laporan	100 persen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	125.000.000	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										53.724.670		125.000.000	
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah laporan sistem informasi kepegawaian	meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	266 laporan	100 persen	53.724.670	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	125.000.000	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1.107.260.405		2.462.250.000	

Kode					Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	47 jenis	100 persen	686,876,105	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	1.450.000.000
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	10 jenis	100 persen	63,674,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	115.000.000
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	2 jenis	100 persen	48,025,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	135.000.000
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	12 kali	100 persen	19,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	45.000.000
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah laporan koordinasi	meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	12 laporan	100 persen	289,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	717.250.000
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.203.984.000					10.000.000.000
1	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah gedung kantor yang dibangun dan siap digunakan	meningkatnya layanan pengadaan barang milik daerah perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	1 unit	100 persen	2.203.984.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	10.000.000.000
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6.828.766.024					6.051.452.000	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Surat yang teregistrasi dengan baik	meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	1000 surat	100 persen	4,452,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	26.452.000
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah rekening yang terbayar tepat waktu	meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	3 rekening	100 persen	682,653,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	725.000.000
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Jasa Pelayanan yang disediakan	meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	6 jasa	100 persen	6,141,661,024	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	5.300.000.000
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1.214.859.728					6.958.000.000	

Kode					Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan yang layak jalan	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	81 nilai	24 unit	100 persen	557,903,728	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	850.000.000
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan yang layak jalan	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	21 unit	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	-
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan dalam keadaan baik	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	1 unit	100 persen	197,876,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	5.780.000.000
1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	8 jenis	100 persen	459,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	328.000.000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								211.900.839.293			639.990.531.839		
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								133.279.005.810			345.665.000.000		
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	Jumlah USB (Unit Sekolah Baru) yang dibangun dan siap digunakan	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	8 sekolah	100 persen	61,485,124,128			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 persen	105.000.000.000
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	20 Ruang kelas	100 persen	9,045,458,304	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 persen	52.000.000.000
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	Jumlah Perlengkapan peserta didik yang akan diadakan dan siap digunakan	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 sekolah	100 persen	4,841,775,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 persen	5.000.000.000
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	82 sekolah	100 persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 persen	2.400.000.000
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	82 sekolah	100 persen	57,746,647,928	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 persen	47.500.000.000
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang terbina	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	82 sekolah	100 persen	30,000,000			Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 persen	80.000.000

Kode					Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah SMA Negeri/Swasta se-Bali yang menerima Dana BOS	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	160 sekolah	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 persen	133.650.000.000
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	Jumlah Sekolah yang mengelola Dana BOS dengan baik	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	82 sekolah	100 persen	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100 persen	35.000.000
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								69.107.756.993					268.472.400.000
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun dan siap digunakan	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 persen	3 sekolah	100 persen	12.871,556,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	47 persen	55.000.000.000
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	Jumlah Kelas Baru yang ditambah dan siap digunakan	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 persen	2 sekolah	100 persen	1,152,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	47 persen	13.200.000.000
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun dan siap digunakan	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 persen	3 sekolah	100 persen	603,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	47 persen	3.000.000.000
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	jumlah personil peserta didik yang tersedia	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 persen	500 siswa	100 persen	4.835.355.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	47 persen	1.100.000.000

Kode					Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	Jumlah sekolah yang mengikuti pembinaan minat, bakat dan kreatifitas	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 persen	53 sekolah	100 persen	87.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	47 persen	4.000.000.000
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 persen	670 guru	100 persen	49.500.046.158	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	47 persen	35.500.000.000
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang terbina	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 persen	53 sekolah	100 persen	57.999.835	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	47 persen	1.650.000.000
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	Jumlah Sekolah SMK Negeri/Swasta se-Bali yang menerima Dana BOS	Meningkatnya Pelayanan pendidikan menengah kejuruan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 persen	175 sekolah	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di dunia usaha/dunia industri	47 persen	155.022.400.000
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus							9.514.076.490					25.853.131.839	
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	Jumlah ruang kelas baru yang ditambah dan siap digunakan	Meningkatnya layanan pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.45 persen	3 sekolah	100 persen	1,589,824,884	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	35.45 persen	6,350,347,740
1	01	02	1.03	06	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	Jumlah ruang serba Guna/Aula yang di bangun dan siap digunakan	Meningkatnya layanan pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.45 persen	2 sekolah	100 persen	987,783,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	35.45 persen	2,771,404,240
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	Jumlah ruang kelas sekolah yang di Rehabilitasi dan siap digunakan	Meningkatnya layanan pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.45 persen	1 sekolah	100 persen	165,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	35.45 persen	700,315,000
1	01	02	1.03	36	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan dan siap digunakan	Meningkatnya layanan pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.45 persen	6 sekolah	100 persen	1,094,709,100			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	35.45 persen	4,030,691,669
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	Jumlah personil peserta didik pendidikan khusus yang tersedia	Meningkatnya layanan pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.45 persen	12 Sekolah	100 persen	25.642.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	35.45 persen	31.782.960
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen tindak lanjut evaluasi yang tersusun tepat waktu	Meningkatnya layanan pendidikan khusus		35.45 persen	12 sekolah	100 persen	40.000.000			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	35.45 persen	152.495.420
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan khusus	Meningkatnya layanan pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.45 persen	12 sekolah	100 persen	5,550,517,306	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	35.45 persen	6,594,230,755

Kode					Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	Jumlah tata kelola standar pelayanan minimal PK dan PLK	Meningkatnya layanan pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.45 persen	14 sekolah	100 persen	39,999,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	35.45 persen	387,464,055		
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah yang menerima dana BOS	Meningkatnya layanan pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.45 persen	14 sekolah	100 persen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	35.45 persen	4,811,400,000		
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS dengan baik	Meningkatnya layanan pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.45 persen	14 sekolah	100 persen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	35.45 persen	23,000,000		
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								59,999,950			225.000.000				
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi								59,999,950			225,000,000				
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Nilai prestasi kinerja (NPK) pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terdistribusikan dengan baik	meningkatnya kualitas guru dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86.00 persen	1000 orang	100 persen	59,999,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai prestasi kinerja (NPK) pendidik dan tenaga kependidikan	86.00 persen	225,000,000		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								5.024.882.630			14.445.000.000				
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								249.999.930			3.125.000.000				
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi								249.999.930			3.125.000.000				
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	Jumlah peserta seleksi Paskibraka, Gita Bahana Nusantara, dan Jambore Pemuda Daerah	meningkatnya prestasi dan daya saing pemuda	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.15 persen	178 orang	268 orang	249.999.930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam pembangunan	4.15 persen	3.125.000.000		
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								4.274.882.700			8.820.000.000				
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga								4.000.000.000			8.100.000.000				
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah Cabang Olahraga dan jumlah Atlet serta ofisial yang mengikuti Multi Event dan Single Event	Meningkatnya jumlah kejuaraan olahraga tingkat provinsi dan kualitas kompetisi cabang olahraga yang berhasil diselenggarakan ditingkat provinsi maupun tingkat Nasional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 medali	32 cabang olahraga	5 kegiatan	4,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	100 medali	8,100,000,000		
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional								49.883.040			20.000.000				
2	19	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga	Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah Data dan Informasi Sektorol Olahraga	meningkatnya prestasi pada Single event dan Multi event tingkat Nasional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 medali	10 data	150 orang	49.883.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	100 medali	20.000.000		

Kode					Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						224.999.660				700.000.000			
2	19	03	1.04	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah Lembaga yang memenuhi Standar Keorganisasian	Meningkatnya jumlah Organisasi keolahragaan tingkat provinsi yang berprestasi yang dibina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 medali	20 organisasi	52 organisasi	49,999,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	100 medali	50,000,000
2	19	03	1.04	03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga/Organisasi keolahragaan	Meningkatnya jumlah Organisasi keolahragaan tingkat provinsi yang berprestasi yang dibina	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 medali	25 lembaga	52 organisasi	175,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah medali yang diperoleh atlet pelajar ditingkat regional, nasional dan internasional	100 medali	650,000,000
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						500,000,000				2,500,000,000			
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						500,000,000				2,500,000,000			
2	19	04	1.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif dalam Satuan Karya Pramuka	Jumlah kegiatan kepramukaan tingkat provinsi	meningkaanya kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	25 kegiatan	49 persen	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kegiatan kepramukaan tingkat provinsi	25 kegiatan	2,500,000,000
TOTAL													902.120.059.942				1.522.855.238.004	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0001 UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											3.850.544.849			5.918.717.376
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											2.980.328.579			3.818.717.376
1	01	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2.453.385.589			2.800.000.000
1	01	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya dibayar tepat waktu	Meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	14 Orang	100 persen	2.453.385.589	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	2.800.000.000	
1	01	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											88.479.510			378.000.000
1	01	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Peralatan Gedung Kantor dalam Keadaan Baik	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	43 Jenis	100 persen	58.009.510	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	210.000.000	
1	01	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Barang Cetakan yang Tersedia	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	4 Jenis	100 persen	4.194.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	10.000.000	
1	01	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	3 Jenis	100 persen	3.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	8.000.000	
1	01	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	30 Laporan	100 persen	22.776.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	150.000.000	
1	01	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											376.764.480			456.717.376,00
1	01	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah jasa surat menyurat	meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	800 Surat	100 persen	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	7.000.000	
1	01	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor	meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	10 Orang	100 persen	374.764.480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	449.717.376	
1	01	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											61.699.000			184.000.000

Kode					Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan yang layak jalan atau pakai	meningkatnya layanan pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	2 Kendaraan	100 persen	48.699.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	130.000.000
1	01	01	1,09	05	Pemeliharaan Mebel	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah mebel dalam keadaan baik	meningkatnya layanan pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	1 Paket	100 persen	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	25.000.000
1	01	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Peralatan Kantor yang dalam keadaan baik	meningkatnya layanan pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	1 Paket	100 persen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	29.000.000
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								870.216.270				2.100.000.000	
1	01	02	1,01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas								529.076.740				1.100.000.000	
1	01	02	1,01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMA	Meningkatnya layanan berbasis TIK pada pendidikan menengah atas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	88 Sekolah	100 persen	508.292.140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 persen	700.000.000
1	01	02	1,01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya layanan berbasis TIK pada pendidikan menengah atas	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	270 Orang	100 persen	20.784.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 persen	400.000.000
1	01	02	1,02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								341.139.530				1.000.000.000	
1	01	02	1,02	39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Jumlah Sekolah yang menyelenggarakan PPDB dan proses belajar bagi Peserta Didik pada Jenjang SMK	Meningkatnya layanan berbasis TIK pada pendidikan menengah kejuruan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	55 Sekolah	100 persen	320.455.270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 persen	600.000.000

Kode					Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	02	1,02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	Jumlah Tenaga Pendidik yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran Berbasis TIK pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya layanan berbasis TIK pada pendidikan menengah kejuruan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 persen	270 Orang	100 persen	20.684.260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	50 persen	400.000.000	
TOTAL														3.850.544.849	5.918.717.376			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.0002 UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan

Kode					Indikator Kinerja					Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										27.770.870.323				30.096.124.607
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										2.469.082.207				2.586.124.607
1	01	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.144.359.919				2.213.009.919
1	01	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya tepat waktu	Meningkatnya kualitas laporan pertanggung jawaban keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	13 orang	100 persen	2.144.359.919	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	2.213.009.919	
1	01	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										43.865.600				83.898.000
1	01	01	1,06	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia dan siap digunakan	meningkatkan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	20 jenis	100 persen	14.981.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	25.000.000	
1	01	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	meningkatkan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	4 jenis	100 persen	8.699.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	11.000.000	
1	01	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	meningkatkan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	3 jenis	100 persen	1.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	3.600.000	
1	01	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah laporan koordinasi	meningkatkan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	31 laporan	100 persen	18.584.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	44.298.000	
1	01	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										225.858.688				226.858.688
1	01	01	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Surat yang teregistrasi dengan baik	meningkatkan layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	200 surat	100 persen	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	2.000.000	
1	01	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tenaga Sopir untuk Menunjang Urusan Kantor	meningkatkan layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	6 orang	100 persen	224.858.688	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	224.858.688	
1	01	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										54.998.000				62.358.000

Kode						Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	01	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			meningkatkan layanan pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 nilai	1 unit	100 persen	54.998.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 nilai	62.358.000	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								274.997.300					510.000.000	
1	01	03	1,01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah								224.998.050					435.000.000	
1	01	03	1,01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	jumlah dokumen kompetensi dasar muatan lokal pada satuan pendidikan menengah	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.37 persen	1 dokumen	100 persen	130.029.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	51.37 persen	185.000.000	
1	01	03	1,01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	jumlah analisis dokumen awal muatan lokal pendidikan menengah	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.37 persen	1 dokumen	100 persen	50.209.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	51.37 persen	150.000.000	
1	01	03	1,01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.37 persen	50 orang	100 persen	44.759.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	51.37 persen	100.000.000	
1	01	03	1,02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus								49.999.250					75.000.000	
1	01	03	1,02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	Jumlah peserta pelatihan penyusunan kurikulum Muatan lokal pendidikan khusus	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan berbasis Keagamaan dan kearifan lokal pada satuan pendidikan khusus	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51.37 persen	80 orang	100 persen	49.999.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	51.37 persen	75.000.000	
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA								25.026.790.816					27.000.000.000	
1	01	06	1,01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								25.026.790.816					27.000.000.000	
					Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Persentase implementasi penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan	Jumlah gaji penyuluh Bahasa Bali yang dibayarkan	meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 persen	667 orang	100 persen	25.026.790.816	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase implementasi penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali pada satuan pendidikan	70 persen	27.000.000.000	
TOTAL													27.770.870.323					30.096.124.607	



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jalan Raya Puputan Renon Denpasar, 80235
Telp. (0361) 226119, 2351051

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BALI**

NOMOR : B.31.800/13628/PPEP/DIKPORA

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (*RENJA*)
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencakup tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali perlu menyusun Rencana Kerja (*RENJA*) Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (*RENJA*) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kerja (*RENJA*) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kerja (*RENJA*) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menghimpun bahan/materi yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja (*RENJA*) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022;
 - b. mengolah bahan/materi dimaksud diatas dan menyusun Rencana Kerja (*RENJA*) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022;
 - c. menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja (*RENJA*) Tahun Anggaran 2022 kepada Bappeda Provinsi Bali dan Inspektorat Provinsi Bali; dan
 - d. melaporkan hasil kerja Tim penyusun kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal : 16 Feruari 2021



KEPALA DINAS,

KN. BOY JAYAWIBAWA
NIP. 19651130 199203 1 010

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi Bali di Bali (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali
3. Inspektur Provinsi Bali di Bali.
4. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali.
7. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Bali.
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA PROVINSI BALI
NOMOR :B.31.800/13628/DISDIKPORA
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (*RENJA*)
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2022

Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kerja (*RENJA*) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- A. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
- B. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
- C. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
- D. Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
 2. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
 3. Kepala Bidang Pembinaan PK dan PLK Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
 4. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
 5. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
 6. Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
 7. Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
 8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;

9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
10. I Gusti Made Suyadnya, S.Kom., Staf Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
11. Ir. Ketut Gede Sumandiasa, Staf Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;



KEPALA DINAS,

KN. BOY JAYAWIBAWA

NIP. 19651130 199203 1 010